



Pengaruh Kemiskinan, PDRB, dan Pengangguran terhadap Kriminalitas di Jakarta dan Jabar

Risma, Atih Rohaeti Dariah*

Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 27/9/2024

Revised : 20/12/2024

Published : 31/12/2024



Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 4

No. : 2

Halaman : 109 - 116

Terbitan : **Desember 2024**

Terakreditasi Sinta [Peringkat 4](#)
berdasarkan Ristekdikti
No. 177/E/KPT/2024

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis angka kriminalitas di Indonesia, dengan fokus pada perbandingan antara DKI Jakarta dan Jawa Barat. Data menunjukkan bahwa DKI Jakarta, sebagai pusat aktivitas sosial, politik, dan ekonomi dengan kontribusi 16,68 persen terhadap PDB nasional, memiliki angka kriminalitas tertinggi kedua di Indonesia. Sebaliknya, Jawa Barat, meskipun merupakan provinsi dengan populasi terbanyak dan kontribusi 13,57 persen terhadap PDB, angka kriminalitasnya lebih rendah dibandingkan DKI Jakarta. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh dari kemiskinan, PDRB per kapita dan pengangguran terhadap kriminalitas di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat tahun 2013-2022 dan mengetahui perbandingan pengaruh kemiskinan, PDRB per kapita, dan pengangguran terhadap kriminalitas antara Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan metode *time series*. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial Kemiskinan berpengaruh positif terhadap Angka Kriminalitas di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat, PDRB Per Kapita berpengaruh negatif terhadap Angka Kriminalitas di DKI Jakarta dan tidak berpengaruh terhadap Angka Kriminalitas di Jawa Barat, Pengangguran berpengaruh negatif terhadap Angka Kriminalitas di DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Kata Kunci: *Kemiskinan, Pengangguran, Kriminalitas.*

ABSTRACT

This study analyzes the crime rate in Indonesia, focusing on the comparison between DKI Jakarta and West Java. The data shows that DKI Jakarta, as the center of social, political and economic activities with a 16.68 percent contribution to national GDP, has the second highest crime rate in Indonesia. In contrast, West Java, despite being the province with the largest population and contributing 13.57 percent to GDP, has a lower crime rate than DKI Jakarta. This study aims to determine the effect of poverty, GRDP per capita and unemployment on crime in DKI Jakarta and West Java Provinces in 2013-2022 and to compare the effect of poverty, GRDP per capita, and unemployment on crime between DKI Jakarta and West Java Provinces. This type of research is descriptive quantitative, using time series. The results showed that partially poverty has a positive effect on crime rates in DKI Jakarta and West Java Provinces, GRDP per capita has a negative effect on crime rates in DKI Jakarta and has no effect on crime rates in West Java, unemployment has a negative effect on crime rates in DKI Jakarta and West Java.

Keywords: *Poverty, Unemployment, Criminality.*

Copyright© 2024 The Author(s).

A. Pendahuluan

Kriminalitas merupakan fenomena yang terjadi dimana pun termasuk di Indonesia, yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dewasa juga oleh anak-anak (Sari & Farida, 2021). Kesenjangan sosial ekonomi dilansir sebagai kondisi yang berdampak pada tindakan yang dilakukan oleh para individu di luar batas kewajaran dan keharusan (Dulkiah & Nurjanah, 2018).

(BPS, 2023) Pada tahun 2021, Provinsi dengan angka kriminalitas tertinggi di Indonesia adalah Sumatera Utara, DKI Jakarta, dan Jawa Timur. DKI Jakarta sebagai ibu kota negara dan pusat kegiatan sosial, politik dan ekonomi yang berkontribusi sebanyak 16,68 persen terhadap PDB di nasional memiliki jumlah kejahatan kedua tertinggi di Indonesia. Sementara Provinsi Jawa Barat berada pada peringkat ke-sembilan dari total 34 Provinsi yang ada di Indonesia, padahal Jawa Barat merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia serta memiliki kontribusi sebesar 13,57 persen terhadap PDB Indonesia. Jumlah kejahatan yang dilaporkan di Provinsi Jawa Barat hanya 25 persen dibandingkan dengan DKI Jakarta.

Jawa Barat merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk tertinggi di Indonesia, angka kriminalitasnya tidak setinggi Provinsi DKI Jakarta. Sepanjang tahun 2013-2022, meskipun jumlah penduduk Jawa Barat terus meningkat hingga mencapai 50.025.605 jiwa pada tahun 2022, angka kriminalitas di Provinsi ini cenderung lebih rendah dibandingkan dengan DKI Jakarta. Pada tahun 2021, jumlah penduduk DKI Jakarta adalah 10.605.437 jiwa dengan angka kriminalitas 29.103 kasus, namun Jawa Barat dengan penduduk 49.405.808 hanya mencatatkan 7.502 kasus kriminalitas. Hal ini menunjukkan bahwa angka kriminalitas di Jawa Barat relatif lebih rendah dibandingkan DKI Jakarta meskipun memiliki jumlah penduduk yang jauh lebih besar (BPS, 2023).

Fenomena tersebut menarik untuk diteliti, variabel apa yang menentukan angka kriminalitas di kedua Provinsi tersebut. (Adinda, 2023) Kemiskinan dan kriminalitas saling seimbang di perkotaan, dimana seseorang akan nekat untuk melakukan kriminalitas apabila dalam keadaan tertekan, tindakan kriminalitas dilakukan sebagai alternatif penyelesaian guna memenuhi kebutuhan mereka dalam menjalani kehidupannya. Hal ini diperkuat oleh penelitian (Rahmalia *et al.*, 2019) yang menyatakan kemiskinan mempunyai pengaruh secara signifikan dan positif terhadap kriminalitas di Indonesia. Berbeda dengan penelitian (Rahmalia *et al.*, 2019), (Rahmi & Roza Adry, n.d.) Kemiskinan justru tidak berpengaruh terhadap kriminalitas di Indonesia, artinya setiap terjadi peningkatan pada kemiskinan akan mengakibatkan penurunan pada kriminalitas.

Selain kemiskinan, (Anggraini, 2022) pengangguran identik dengan rendahnya kesejahteraan dan pendapatan, hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah-masalah sosial, salah satunya akan berdampak pada meningkatnya perilaku kriminal yang dapat mengganggu masyarakat serta mempengaruhi pelaksanaan pembangunan nasional dalam jangka pendek dan jangka panjang. Hal ini diperkuat oleh penelitian (Fachrurrozi *et al.*, 2021) yang menyatakan bahwa pengangguran mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kriminalitas di Indonesia. Artinya, ketika pengangguran mengalami kenaikan, kriminalitas akan mengalami peningkatan. Berbeda dengan penelitian (Fachrurrozi *et al.*, 2021), justru pengangguran mempunyai hubungan negatif dan signifikan terhadap kriminalitas di Indonesia, artinya jika pengangguran meningkat maka akan berpengaruh terhadap penurunan angka kriminalitas (Rahmalia *et al.*, 2019).

Disisi lain (Purwanti & Widyaningsih, 2019) PDRB yang tinggi biasanya menunjukkan kondisi ekonomi yang baik, yang seringkali dikaitkan dengan angka kriminalitas yang lebih rendah. Sebaliknya, PDRB yang rendah menunjukkan kemiskinan yang meluas dan peluang ekonomi yang terbatas, yang dapat meningkatkan tingkat kriminalitas. (Putri *et al.*, 2019) PDRB perkapita tidak berpengaruh terhadap tindak kriminal, hubungan negatif antara PDRB perkapita dan tindak kriminal mengindikasikan bahwa setiap terdapat peningkatan PDRB maka akan menurunkan tindak kriminal di Jawa Barat. Sedangkan, (Merton, 1938) PDRB per kapita justru memiliki pengaruh negatif yang signifikan di pulau jawa karena apabila jumlah penduduk tinggi maka cenderung menurunkan PDRB per kapita, sehingga penyerapan tenaga kerja menjadi rendah dan mengakibatkan banyak orang menjadi pengangguran.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “apakah kemiskinan, PDRB per kapita, dan pengangguran memberikan pengaruh terhadap kriminalitas di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui pengaruh dari kemiskinan terhadap angka kriminalitas di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat tahun 2013-2022. (2) Untuk mengetahui pengaruh dari PDRB per kapita terhadap angka kriminalitas di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat tahun 2013-2022. (3) Untuk mengetahui pengaruh dari Pengangguran terhadap angka kriminalitas di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat tahun 2013-2022. (4) Untuk mengetahui pengaruh Kemiskinan, PDRB per kapita dan pengangguran terhadap angka kriminalitas di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat tahun 2013-2022.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif pendekatan kuantitatif. Deskriptif kuantitatif digunakan untuk menjelaskan bagaimana pengaruh dari Kemiskinan, PDRB per Kapita dan Pengangguran terhadap Kriminalitas di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat tahun 2013-2022 (Sugiyono, 2021). Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang didapatkan melalui Badan Pusat Statistik Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi time series

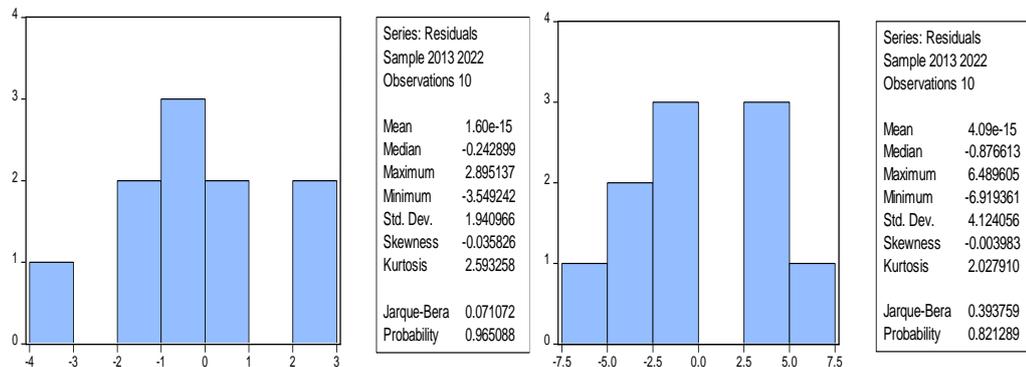
C. Hasil dan Pembahasan

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dengan metode data *time series*. Data *time series* yang digunakan adalah data dari tahun 2013 hingga 2022 pada dua Provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat sehingga data yang diamati pada penelitian berjumlah 40 observasi. Bagian ini diawali dengan menampilkan hasil estimasi untuk memperoleh informasi hubungan antar variabel secara statistik dan ekonometrika.

Uji Ekonometrik

1. Uji Normalitas

Tabel 1. Uji Normalitas



Sumber: Hasil olah data dengan Eviews 10, 2024

Hasil uji normalitas untuk Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa nilai *Probabilty Jarque-Bera* (Prob-JB) sebesar 0.965088 yang berarti nilai tersebut lebih besar daripada taraf signifikan 5%. Hal ini menjelaskan bahwa data untuk Provinsi DKI Jakarta dalam penelitian ini berdistribusi normal. Hasil uji normalitas untuk Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa *Probabilty Jarque-Bera* (Prob-JB) sebesar 0.821289 yang berarti nilai tersebut lebih besar daripada taraf signifikan 5%. data dari kedua Provinsi yang meliputi DKI Jakarta dan Jawa Barat, berdistribusi normal dan memenuhi asumsi yang diperlukan untuk analisis lebih lanjut dalam penelitian ini.

2. Uji Multikolinieritas

Tabel 2. Uji Multikolinieritas

Variable	DKI Jakarta	Jawa Barat
	Centered VIF	Centered VIF
C	NA	NA
Kemiskinan (X1)	2.865242	3.678988
PDRB per Kapita (X2)	1.657307	3.143408
Pengangguran (X3)	2.297340	1.777704

Sumber: Hasil olah data dengan Eviews 10, 2024

Hasil uji multikolinieritas untuk Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat menunjukkan bahwa masing-masing variabel bebas memiliki nilai *Centered VIF* lebih kecil dari nilai 10. Hal ini menjelaskan bahwa data untuk Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat dalam penelitian ini tidak mengalami masalah multikolinieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3. Uji Hetereskodastisitas

Variabel	Prob. DKI Jakarta	Prob. Jawa Barat
Kemiskinan (X1)	0.6920	0.6401
PDRB per Kapita (X2)	0.3274	0.3264
Pengangguran (X3)	0.5856	0.7199

Sumber: Hasil olah data dengan Eviews 10, 2024

Hasil uji heteroskedastisitas untuk Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat menunjukkan bahwa masing-masing variabel bebas memiliki nilai *probabilitas* lebih besar dari taraf signifikan 5 persen. Hal ini menjelaskan bahwa data untuk Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat dalam penelitian ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Tabel 4. Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:	DKI Jakarta	Jawa Barat
F-statistic	1.246.068	0.913470
Obs*R-squared	3.838.700	3.135.333
Prob. F(2,4)	0.3796	0.4712
Prob. Chi-Square(2)	0.1467	0.2085

Sumber: Hasil olah data dengan Eviews 10, 2024

Hasil uji autokorelasi untuk Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa *Probabilty Chi-Square* sebesar 0.1467 yang berarti nilai tersebut lebih besar daripada taraf signifikan 5%. Hasil uji autokorelasi untuk Provinsi Jawa Barat pun menunjukkan bahwa *Probabilty Chi-Square* sebesar 0.2085 yang berarti nilai tersebut lebih besar daripada taraf signifikan 5%. Hal ini menjelaskan bahwa data untuk Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat dalam penelitian ini tidak terdapat masalah autokorelasi.

Uji Statistik

1. Uji t (parsial)

Tabel 5. Uji t (Parsial)

Variabel	DKI Jakarta			Jawa Barat		
	Prob.	Hipotesis	Simpulan	Prob.	Hipotesis	Simpulan
Kemiskinan (X1)	0.2449	H0 ditolak	Signifikan	0.0390	H0 ditolak	Signifikan
PDRB per Kapita (X2)	0.0002	H0 ditolak	Signifikan	0.4396	H0 diterima	Tidak Signifikan
Pengangguran (X3)	0.0278	H0 ditolak	Signifikan	0.0151	H0 ditolak	Signifikan

Sumber: Hasil olah data dengan Eviews 10, 2024

Hasil Uji t menunjukkan bahwa hanya satu variabel yang memiliki nilai lebih besar dari alpha 0.05 yaitu variabel PDRB per Kapita di Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel PDRB per kapita di Provinsi Jawa Barat tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependent (angka kriminalitas). Sementara itu, varibel lainnya yakni kemiskinan, pengangguran, dan PDRB per kapita di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan adanya pengaruh terhadap variabel dependent (angka kriminalitas).

2. Uji F

Tabel 6. Uji F

Prob (F-Statistic)	DKI Jakarta	Jawa Barat
0,000000	0.000533	0.029916

Sumber: Hasil olah data dengan Eviews 10, 2024

Hasil uji f-statistik untuk Provinsi DKI Jakarta didapatkan nilai Prob(F-statistik) sebesar 0.000533. Dengan tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Angka Prob(F-statistik) sebesar $0.000533 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak, artinya variabel kemiskinan, PDRB per Kapita, dan pengangguran memiliki pengaruh secara simultan terhadap kriminalitas di DKI Jakarta. Sedangkan, hasil uji f-statistik untuk Provinsi Jawa Barat didapatkan nilai Prob(F-statistik) sebesar 0.029916. Dengan tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Angka Prob(F-statistik) sebesar $0.029916 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak, artinya variabel kemiskinan, PDRB per Kapita, dan pengangguran memiliki pengaruh secara simultan terhadap kriminalitas di Provinsi Jawa Barat.

3. Koefisien Determinasi

Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi	DKI Jakarta	Jawa Barat
R-squared	0.937046	0.752500

Sumber: Hasil olah data dengan Eviews 10, 2024

Hasil koefisien determinasi untuk Provinsi DKI Jakarta diperoleh nilai R^2 sebesar 0.9370, nilai tersebut menunjukkan bahwa 93,70 persen kriminalitas di Provinsi DKI Jakarta dipengaruhi oleh kemiskinan, PDRB per Kapita, dan pengangguran, sisanya 6,3 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam model. Sedangkan, hasil koefisien determinasi untuk Provinsi Jawa Barat diperoleh nilai R^2 sebesar 0.7525, nilai tersebut menunjukkan bahwa 75,25 persen kriminalitas di Provinsi Jawa Barat dipengaruhi oleh kemiskinan, PDRB per Kapita, dan pengangguran, sisanya 24,75 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam model.

Pengaruh Kemiskinan (X1) terhadap Angka Kriminalitas (Y)

Hasil estimasi model menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh terhadap angka kriminalitas baik di DKI Jakarta maupun di Jawa Barat dengan tingkat signifikansi yang lebih tinggi di Jawa Barat. Ketika kemiskinan di DKI Jakarta naik 1 persen maka akan meningkatkan angka kriminalitas sebesar 3.509 kasus. Sementara di Jawa Barat ternyata pengaruh kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan DKI Jakarta, ketika kemiskinan naik 1 persen, angka kriminalitas melonjak sebesar 9.067 kasus.

Teori Strain (Merton, 1938) menjelaskan bahwa individu yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar, mereka cenderung mengalami tekanan yang dapat mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Jika dilihat dari garis kemiskinan, nilai garis kemiskinan di DKI Jakarta lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Barat. Namun, karena PDRB per kapita di DKI Jakarta juga tinggi, tingkat kemiskinannya relatif rendah. Sebaliknya, garis kemiskinan di Jawa Barat relatif lebih rendah, tetapi jumlah penduduknya sangat banyak dan PDRB per kapita jauh lebih rendah dibandingkan DKI Jakarta sehingga menyebabkan presentase penduduk miskin relatif lebih tinggi. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi variabel yang sangat rentan mempengaruhi angka kriminalitas, terutama kejahatan dalam bentuk pencurian.

Tekanan ekonomi yang tinggi dapat mendorong individu untuk mencari cara-cara alternatif dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, termasuk melalui tindakan kriminal seperti pencurian. Data kriminalitas menunjukkan bahwa pada tahun 2022, angka pencurian di DKI Jakarta mencapai 6.008 kasus. Di sisi lain, Jawa Barat mengalami peningkatan yang lebih besar dalam kasus pencurian, dengan angka yang cukup melonjak dari 5.654 kasus pada tahun 2018 menjadi 8.881 kasus pada tahun 2022. Peningkatan angka pencurian mencerminkan dampak dari kemiskinan dan tekanan ekonomi terhadap perilaku kriminal. Di DKI Jakarta, meskipun angka pencurian tinggi, tingkat kemiskinan relatif lebih rendah dibandingkan Jawa Barat menunjukkan bahwa tekanan ekonomi yang dirasakan penduduk lebih terkendali dibandingkan dengan di Jawa Barat. Sebaliknya, Jawa Barat menghadapi kondisi kemiskinan dengan populasi yang sangat besar dan persentase penduduk miskin yang tinggi. Hal ini dapat menciptakan tekanan ekonomi yang lebih besar, mendorong individu untuk melakukan pencurian sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Pengaruh PDRB per Kapita (X2) terhadap Angka Kriminalitas (Y)

Hasil estimasi model di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa PDRB per kapita mempengaruhi angka kriminalitas. Bahwasanya ketika PDRB per kapita meningkat sebesar 1 juta rupiah, maka akan menurunkan angka kriminalitas sebesar 439 kasus. Berbeda dengan DKI Jakarta, hasil estimasi variabel PDRB per kapita di Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa PDRB per kapita tidak berpengaruh terhadap angka kriminalitas. Teori Ekonomi Kejahatan (Becker, 1968) menjelaskan bahwa keputusan seseorang untuk melakukan tindak kejahatan didasarkan pada perhitungan manfaat-biaya (*benefit-cost analysis*) dari tindak kejahatan itu sendiri. Jika *expected benefit* suatu tindak kejahatan melebihi *expected cost*-nya, maka sebagai pelaku ekonomi yang rasional, individu akan cenderung melakukan tindak kriminal. Sebaliknya, jika perhitungan dari seorang individu menunjukkan bahwa *expected cost* melebihi *expected benefits* dari suatu tindak kejahatan, maka yang bersangkutan tidak akan melakukan tindakan tersebut.

PDRB per kapita di DKI Jakarta sangat tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya di Indonesia, meningkatnya PDRB per kapita dapat diasumsikan bahwa pendapatan masyarakat juga meningkat, peningkatan PDRB per kapita di DKI Jakarta diprediksi akan menurunkan angka kejahatan terutama penipuan, penggelapan, dan korupsi. Penipuan dan penggelapan sering kali terjadi karena tekanan ekonomi yang dirasakan oleh individu, sementara korupsi lebih terkait dengan kesempatan dan kebutuhan finansial yang mendesak. Ketika pendapatan masyarakat meningkat, kebutuhan untuk melakukan kejahatan tersebut cenderung menurun karena kondisi ekonomi yang lebih stabil dan sejahtera. Oleh karena itu, peningkatan PDRB per kapita memiliki dampak positif terhadap penurunan angka kriminalitas di DKI Jakarta. PDRB per kapita yang tinggi, diasumsikan pendapatan masyarakat cukup tinggi. Dengan pendapatan yang memadai, insentif untuk melakukan kejahatan ekonomi seperti penipuan, penggelapan, dan korupsi berkurang karena kebutuhan finansial sudah terpenuhi. Dengan kata lain, *expected benefit* dari tindakan kriminal menjadi lebih kecil dibandingkan dengan *expected cost* (seperti risiko ditangkap dan hukuman).

PDRB per kapita di Jawa Barat tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap angka kriminalitas. Hal ini disebabkan kejahatan di Provinsi Jawa Barat didominasi oleh kasus pencurian, yang secara jelas dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan. PDRB per kapita diperkirakan dapat menurunkan angka kejahatan terutama penggelapan, penipuan, dan korupsi, yang dimana kejahatan tersebut relatif rendah di Jawa Barat.

Pengaruh Pengangguran (X3) terhadap Angka Kriminalitas (Y)

Hasil estimasi model di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh terhadap angka kriminalitas baik di DKI Jakarta maupun di Jawa Barat. Ketika pengangguran di DKI Jakarta naik 1 persen maka akan menurunkan angka kriminalitas sebesar 2.425 kasus. Sementara di Jawa Barat ketika pengangguran naik 1 persen maka akan menurunkan angka kriminalitas sebesar 9.641 kasus.

Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dari pengangguran terhadap kriminalitas di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Hal ini dapat dihubungkan dengan tingkat pengangguran terbuka berdasarkan pendidikan tertinggi. Teori Disorganisasi (Shaw & Mckay, 1942) pada tahun 1942 memprediksi bahwa aspek negatif dari struktur masyarakat, seperti disorganisasi dalam keluarga, kemiskinan atau ketimpangan pendapatan dalam pengaturan ekonomi masyarakat, dan kurangnya keberhasilan dalam proses pendidikan ini lah yang menghasilkan perilaku kriminal (Widyastuti & Haryanto, 2021).

Menurut Badan Pusat Statistika, karakteristik pengangguran di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat di dominasi oleh lulusan sekolah menengah ke atas, individu dengan pendidikan tinggi memiliki pemahaman yang baik tentang konsekuensi hukum dari perbuatan kriminal, pendidikan yang baik dapat memberikan kesadaran akan risiko dan dampak negatif dari aktivitas kriminal, sehingga dapat mengurangi kecenderungan untuk terlibat dalam kejahatan. Pengangguran terdidik tidak secara langsung terlibat dalam aktivitas kriminal, pengangguran terdidik juga dapat memiliki kesadaran mengenai konsekuensi hukum dari tindakan kriminal serta membantu mengurangi tingkat kejahatan melalui peningkatan keterampilan dan pengetahuan (Effendi *et al.*, 2021).

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut: (1) Kemiskinan berpengaruh terhadap angka kriminalitas di kedua Provinsi dengan tingkat signifikansi yang lebih tinggi di Jawa Barat. Di DKI Jakarta, peningkatan kemiskinan sebesar 1 persen meningkatkan angka kriminalitas sebesar 3.509 kasus. Sementara di Jawa Barat, peningkatan kemiskinan sebesar 1 persen meningkatkan angka kriminalitas sebesar 9.067 kasus yang didominasi oleh kasus pencurian. (2) PDRB per kapita memiliki pengaruh negatif terhadap angka kriminalitas di DKI Jakarta. Peningkatan PDRB per kapita sebesar 1 juta rupiah menurunkan angka kriminalitas sebesar 439.173 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kegiatan ekonomi yang dapat menentukan pendapatan berkontribusi pada penurunan angka kriminalitas. Di Jawa Barat, PDRB per kapita tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap angka kriminalitas, karena angka kriminalitas di Provinsi Jawa Barat didominasi oleh kasus pencurian yang lebih dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan. (3) Pengaruh pengangguran terhadap kriminalitas menunjukkan hasil yang tidak sesuai dengan hipotesis awal. Di DKI Jakarta, peningkatan tingkat pengangguran sebesar 1 persen menurunkan angka kriminalitas sebesar 2.425 kasus. Di Jawa Barat, peningkatan tingkat pengangguran sebesar 1 persen menurunkan angka kriminalitas sebesar 9.641 kasus. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan tingginya proporsi pengangguran terdidik di kedua provinsi, yang memiliki pemahaman lebih baik tentang konsekuensi hukum dari tindakan kriminal dan kesadaran yang lebih tinggi akan risiko dan dampak negatif dari aktivitas kriminal. (4) Secara simultan ketiga variabel bebas yakni kemiskinan, PDRB per kapita, dan pengangguran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap angka kriminalitas di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Daftar Pustaka

- Adinda, F. (2023, March 3). Jerat Kemiskinan Di Indonesia Dan Ladang Kriminalitas. <https://Kumparan.Com/Fiolisa-Adinda/Jerat-Kemiskinan-Di-Indonesia-Dan-Ladang-Kriminalitas-1zuyrowy7kq/2>.
- Anggraini, T. S. (2022, January 29). Pengangguran Penyebab Terjadinya Beberapa Tindakan Kriminal. <https://Kumparan.Com/Titis-Setya/Pengangguran-Penyebab-Terjadinya-Beberapa-Tindakan-Kriminal-1xourquxs8>.
- Becker, G. S. (1968). Crime and Punishment: an Economic Approach. In *The Economic Dimensions of Crime* (pp. 13–68). Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1007/978-1-349-62853-7_2
- BPS. (2023). Statistik Kriminal 2023.
- Diva Abigail Yuanda, & Haryatiningsih, R. (2022). Pengaruh Kemiskinan, Pengangguran, dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bandung 2005-2020. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 115–124. <https://doi.org/10.29313/jrieb.vi.1237>
- Dulkiah, M., & Nurjanah. (2018). Pengaruh Kemiskinan Terhadap Tingkat Tindak Kriminalitas Di Kota Bandung. *Jispo*, 8, 36–57.
- Effendi, A. I., Aan Julia, & Meidy Haviz. (2021). Faktor Ekonomi yang Mempengaruhi Kejahatan Properti di Pulau Jawa Tahun 2014-2019. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 41–47. <https://doi.org/10.29313/jrieb.v1i1.172>
- Fachrurrozi, K., Fahmiwati, Hakim, L., Aswadi, & Lidiana. (2021). Pengaruh Kemiskinan Dan Pengangguran Terhadap Kriminalitas Di Indonesia Tahun 2019. *Jurnal Real Riset*, 3.
- Merton, R. K. (1938). Social Structure and Anomie. *American Sociological Review*, 3(5), 672. <https://doi.org/10.2307/2084686>
- Purwanti, E. Y., & Widyaningsih, E. (2019). Analisis Faktor Ekonomi Yang Mempengaruhi Kriminalitas Di Jawa Timur. *Jequ*, 9, 154–177.
- Putri, C. U. C., Haryatiningsih, R., & Haviz, M. (2019). Pengaruh Pdrb Perkapita Dan Jumlah Polisi Terhadap Tindak Kriminal Terlapor Di 7 Kota Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Barat Tahun 2014-2016. *Prosiding Ilmu Ekonomi*, 5, 91–96.

- Rahmalia, S., Ariusni, & Triani, M. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Dan Kemiskinan Terhadap Kriminalitas Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(1), 21–36.
- Rahmi, M., & Roza Adry. (n.d.). Pengaruh Tingkat Putus Sekolah Dan Pengangguran, Terhadap Kriminalitas Di Indonesia. Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang Jl Hamka Kampus Unp Air Tawar Barat Padang, M. (N.D.).
- Sari, W., & Farida, H. (2021). Analisa Kriminologis Kejahatan Pencurian Berdasarkan Teori Differential Association. *Jurnal Panorama Hukum* (Vol. 6).
- Shaw, C., & Mckay, H. (1942). *Juvenile Delinquency And Urban Areas*. Chicago: University Of Chicago Press.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Widyastuti, A. D., & Haryanto, R. A. A. (2021). *Teori Struktur Sosial (Social Structure Theory)*.